

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Revisi Ujian Tertutup	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	23
C. Tujuan Penulisan	23
D. Keaslian Penulisan	24
E. Kegunaan Penulisan	35
F. Cara Penulisan	36
1. Bahan/Materi Penelitian	36
2. Data Penelitian	38
3. Lokasi atau Wilayah Penulisan	42
4. Cara Pengambilan Sampel	44
5. Responden dan Narasumber	45
6. Alat Pengumpulan Data	47
7. Cara Pengumpulan Data	48
8. Analisis Data	48
9. Penarikan Kesimpulan	49
G. Sistematika Disertasi	49
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	53
A. Perusahaan dan Industri	53
1. Tinjauan tentang Perusahaan	53
2. Industri dan Industrialisasi	71

3. Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bidang Perindustrian	78
B. Tinjauan Hubungan Kerja.....	85
1. Konsep Hubungan Kerja.....	85
2. Perjanjian Kerja	92
3. Pengupahan	104
C. Hubungan Industrial	115
1. Pengertian Hubungan Industrial	115
2. Konsep Hubungan Industrial Pancasila	121
3. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	125
D. Tinjauan Pekerja Perempuan	130
1. Konsep Pekerja Perempuan	130
2. Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan	139
E. Tinjauan Pekerja Sektor Informal.....	153
1. Pekerja Sektor Informal	153
2. Pola Hubungan Hukum Pekerja Sektor Informal	158
3. Pelindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Pekerja Sektor Informal	161
F. Tinjauan Pekerja Rumahan.....	177
1. Konsep Pekerja Rumahan	177
2. Karakter Pekerja Rumahan	182
3. Pengaturan Pelindungan Bagi Pekerja Rumahan.....	186
G. Konsep Kemitraan	194
BAB III. LANDASAN TEORI	200
A. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Grand Theory</i>).....	201
B. Teori <i>Equality</i> dan Non Diskriminasi Bagi Pekerja Perempuan (<i>Middle range Theory</i>).....	206
C. Teori Kepastian Hukum (<i>Middle Range Theory</i>).....	213
a. Kepastian Hukum Menurut Pandangan Aliran Positivisme	213
b. Kepastian Hukum Menurut Pandangan Aliran Legisme	216
D. Teori Keadilan (<i>Middle Range Theory</i>).....	219
E. Teori Pelindungan Hukum (<i>Applied Theory</i>)	227

F. Teori Politik Hukum (<i>Applied Theory</i>)	233
G. Teori Peraturan Perundang-Undangan (<i>Applied Theory</i>).....	239
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	247
A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Dengan Plasma Pada Industri Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Plasma Perempuan	247
1. Hubungan Hukum Antara Perusahaan dengan Plasma Industri Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.....	247
2. Konstruksi Hubungan Hukum Plasma (Cabang dan Pengepul) dan Pekerja Perempuan Pada Industri Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga	277
3. Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan pada Plasma Industri Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga.....	309
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Plasma Industri Bulu Mata Palsu.....	334
1. Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Berkenaan Dengan Pelindungan Hak Pekerja Perempuan.....	334
2. Kendala Normatif Pelindungan Pekerja Informal Perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	354
3. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Memberikan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Plasma Industri Bulu Mata Palsu.....	372
C. Bentuk Pengaturan yang Sebaiknya Mengenai Konstruksi Hubungan Hukum Antara Perusahaan Industri Bulu Mata Palsu dengan Plasma dan Hubungan Antara Plasma dengan Pekerja Perempuan pada Plasma Industri Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga	397
1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pengaturan hak-hak Pekerja Rumahan	397
2. Perbandingan Pengaturan Pekerja Rumahan di Negara Thailand dan Philipina	413

3. Bentuk Pengaturan yang Sebaiknya Hubungan Hukum Antara Perusahaan Industri Bulu Mata Palsu dengan Plasma dan Hubungan Antara Plasma dengan Pekerja Perempuan pada Plasma Industri Bulu Mata Palsu yang sebaiknya di Kabupaten Purbalingga.....	425
BAB V. PENUTUP	487
A. Kesimpulan	487
B. Saran	488
DAFTAR PUSTAKA.....	489